

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Boyolali melaksanakan pilkada serentak yang diikuti oleh 19 kecamatan dan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pengisian jabatan kepala daerah ini diselenggarakan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Masa jabatan kepala daerah telah diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pilkada bertujuan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang bertanggung jawab, mengayomi masyarakat dan juga menjamin kehidupan yang sejahtera bagi masyarakatnya. Pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat partai politik yang mendukung proses pemilihan umum tersebut. Adanya partai politik diharapkan mampu menyeleksi calon-calon pemimpin yang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Peranan partai politik dalam proses pemenangan calon kepala daerah juga sangat penting, meskipun harus didukung dengan strategi politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan partai politik itu sendiri.

Selain itu partai politik juga dapat berperan sebagai sarana rekrutmen politik. Hal ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan. Dalam hal ini setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dapat menjadikan partai mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan partainya. Selain itu dengan adanya kader-kader yang baik,

sebuah partai tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon tersebut ke kepemimpinan tingkat nasional. Rekrutmen politik ini dapat menjamin kelestarian partai. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk melatih calon-calon pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum diyakini sebagian besar masyarakat sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya. Oleh karena itu pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

. Dengan adanya pilkada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas pemerintahan lokal. Ketika seorang kandidat terpilih menjadi kepala daerah, maka kandidat pemimpin tersebut harus dapat meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level lokal.¹ Saat ini, pemilihan kepala daerah berasumsi bagaimana para calon kepala daerah mampu mempengaruhi dan merebut hati masyarakat. Partai politik mendorong supaya pemilih hanya untuk memilih kader dari partainya saja. Partisipasi masyarakat pada saat pemilihan umum sangat penting karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan semua itu, maka masyarakat diminta untuk memilih salah satu kader dari partai-partai yang

¹ Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) Hlm. 17

mengikuti pilkada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh kandidat.

Proses pemilihan kepala daerah tidak jauh dari *money politic* atau sering disebut dengan politik uang. Terdapat larangan mengenai politik uang yang diatur dalam UU No 1 Pasal 73 ayat (1) tahun 2015 yaitu bahwa calon kepala daerah dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Tetapi pada realitanya politik uang dari tahun ke tahun semakin kuat. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pilkada. Panitia pelaksanaan pemilihan kepala daerah menetapkan 2 orang calon kepala daerah yaitu Seno Samodro dari PDIP dan Agus Purmanto dari Partai Gerindra. Dari kedua calon kepala daerah yang maju dalam pilkada, Seno Samodro dinilai sebagai calon kepala daerah yang terkuat dari pada Agus Purmanto. Periode sebelumnya Seno Samodro telah memenangkan pilkada di Kabupaten Boyolali dan menjabat sebagai Kepala Daerah. Seno Samodro juga pernah menjadi wakil Kepala Daerah Kabupaten Boyolali. Pada pilkada 2015 Seno Samodro sanggup untuk dicalonkan kembali menjadi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali oleh PDIP untuk kepentingan dan pengamanan partai. Kedua calon Kepala Daerah tersebut bersama tim suksesnya melakukan kampanye di lingkungan Boyolali dengan menerapkan strategi yang telah dibuat oleh kedua calon Kepala Daerah tersebut seperti menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat umum. Kedua calon

Kepala Daerah menggunakan strategi yang sama untuk memenangkan pilkada yaitu dengan menggunakan politik uang.

Pemenangan calon Kepala Daerah juga tergantung dari perilaku pemilih masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali. Perilaku pemilih dapat berubah-ubah sesuai dengan preferensi yang melatarinya. Berbagai perubahan perilaku pemilih dalam konteks partisipasi politik ini banyak ditunjukkan oleh mereka yang disebabkan karena perubahan sistem politik, tumbuhnya kesadaran kelas, masuk dalam orang yang berpengaruh pada suatu partai politik, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon kepala daerah.² Akan tetapi perubahan perilaku pemilih lebih dominan disebabkan karena perubahan sistem politik. Perubahan perilaku pemilih sangat mungkin terjadi dalam kondisi masyarakat yang selalu diawasi, dikontrol, dan ditekan oleh partai politik.

² Ibid, hlm. 197

Tabel 1.1
Perbandingan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilukada 2015

No	Daerah Pemilih	Seno Samodro	Agus Purmanto
1	Kecamatan Ampel	32.871	17.012
2	Kecamatan Andong	21.853	10.789
3	Kecamatan Banyudono	23.154	8.109
4	Kecamatan Boyolali	31.596	10.737
5	Kecamatan Cepogo	27.567	7.881
6	Kecamatan Juwangi	15.801	2.996
7	Kecamatan Karanggede	16.496	7.463
8	Kecamatan Kemusu	14.376	8.831
9	Kecamatan Klego	14.985	8.984
10	Kecamatan Mojosongo	28.107	6.115
11	Kecamatan Musuk	32.286	5.691
12	Kecamatan Ngemplak	29.099	17.807
13	Kecamatan Nogosari	21.789	19.465
14	Kecamatan Sambu	16.854	9.365
15	Kecamatan Sawit	14.289	5.402
16	Kecamatan Selo	14.518	4.813
17	Kecamatan Simo	13.854	13.842
18	Kecamatan Teras	21.848	7.020
19	Kecamatan Wonosegoro	22.232	7.634
	Jumlah perolehan suara	413.572	179.954

Sumber: KPU Kabupaten Boyolali (Jumat, 17 Maret 2017)

Pada table 1.1 menunjukkan bahwa perolehan suara dan perolehan antara Seno Samodro dan Agus Purmanto menunjukkan selisih yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa calon kepala daerah dari partai politik Gerindra yaitu Agus Purmanto belum memaksimalkan strategi pemenangan politiknya kepada masyarakat. Kemudian untuk partai politik PDIP yang mengusung Seno Samodro hasil perolehan suaranya lebih banyak dibanding dengan Agus Purmanto, hal ini dikarenakan bahwa Seno Samodro sudah mampu melakukan strategi pemenangan politiknya dalam pemenangan pemilukada di Kabupaten Boyolali Tahun 2015.

Hanya saja terdapat satu kecamatan dari 19 kecamatan yang perolehan suara untuk calon kepala daerah yaitu Seno Samodro yang paling rendah dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Simo. Perolehan suara di Kecamatan Simo hanya terpaut 12 suara oleh kedua calon kepala daerah yaitu Seno Samodro dan Agus Purmanto.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Perhitungan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali.

No	Daerah Pemilih	Seno Samodro	Agus Purmanto
1	Desa Bendungan	634	847
2	Desa Blagung	1.285	1.535
3	Desa Gunung	1.197	876
4	Desa Pelem	1.759	1.557
5	Desa Pentur	1.121	729
6	Desa Simo	1.131	1.420
7	Desa Sumber	174	311
8	Desa Lengkong	1.414	1.049
9	Desa Teter	686	1.326
10	Desa Walen	1.035	848
11	Desa Wates	878	1.231
12	Desa Talak Broto	763	650
13	Desa Temon	746	883

Sumber: KPU Kabupaten Boyolali (Jumat, 17 Maret 2017)

Pada table 1.2 menunjukkan bahwa perolehan suara oleh kedua partai di Kecamatan Simo pada 13 desa yang mengikuti pilkada terdapat 7 desa yang perolehan suara untuk calon Kepala Daerah pertama yaitu Seno Samodro yang diusung oleh partai PDIP lebih rendah dibandingkan dengan perolehan suara untuk calon Kepala Dearah yang kedua yaitu Agus Purmanto yang diusung oleh

partai Gerindra. Dari ke-7 desa tersebut terdapat pula dua desa yang hasil perolehannya lebih banyak pada calon Kepala Daerah kedua yaitu Agus Purmanto dari Partai Gerindra yaitu terjadi di Desa Teter dan Desa Wates. Di Desa Teter dan Desa Wates ini perolehan suara untuk Seno Samodro dari PDIP relatif kecil dari calon Kepala Daerah yang kedua yaitu Agus Purmanto. Perolehan suara di desa ini sangat terpaut jauh sekali, padahal Kabupaten Boyolali *basic* partainya adalah PDIP termasuk pula di Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo. Berdasarkan faktor psikologis Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo termasuk daerah yang mempunyai *basic* partai dengan kelompok abangan. Kelompok abangan di Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo ini merupakan golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis apabila dibandingkan dengan kelompok santri dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang ada didalamnya. Berdasarkan faktor sosiologis Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo termasuk masyarakat yang kelas miskin, karena sebagian besar masyarakat di Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo ini memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian. Ideologi dari PDIP ini sebenarnya adalah menekankan pada kelas sosial bawah, yaitu pendukung dari partai ini masyarakat yang berstrata bawah dan masyarakat miskin. Sedangkan dari faktor ekonomi bagi masyarakat di Desa Teter dan Wates Kecamatan Simo kurang menguntungkan dari segi partai PDIP, karena Seno

Samodro belum mampu menyokong kehidupan masyarakat yang layak sehingga sering dijumpai masyarakat yang kekurangan.

Permasalahan inilah yang menjadi motivasi dan dorongan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengungkap kekalahan Seno Samodro dalam Pilkada Kabupaten Boyolali dan adanya perolehan suara untuk Seno Samodro dari partai politik PDIP untuk dua desa dari Kecamatan Simo dengan perolehan suara paling rendah yang dialami Seno Samodro dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boyolali.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perilaku pemilih di Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo pada Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2015 terhadap Seno Samodro sehingga suara dalam pilkada dapat kalah?
2. Mengapa Kecamatan Simo pemilih perolehan suara Seno Samodro dalam pemilihan pemimpin incumbent di Desa Teter dan Desa Wates relatif kecil?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah segala sesuatu yang mengacu pada hal-hal apa yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan perilaku pemilih di Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo pada Pilkada Boyolali Tahun 2015 yang merasa tidak puas terhadap Seno Samodro sehingga pemilih mengalihkan suaranya.
2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan Kecamatan Simo terutama Desa Teter dan Desa Wates pemilih perolehan suara Seno Samodro dalam pemilihan pemimpin incumbent di Desa Teter relatif kecil

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga mempunyai manfaat atau harapan yang diinginkan ketika hasil penelitian telah terkumpul. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta meningkatkan wawasan penulis mengenai perilaku memilih pada pemilihan kepala daerah dengan menggunakan beberapa pendekatan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan pemilih dalam pemilihan kepala daerah.
2. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang pentingnya memilih dalam pemilihan kepala daerah.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raenaldi Yoga Pratama dalam jurnalnya yang berjudul *Kekalahan PDI-P Dalam Pemilukada Kabupaten Klungkung Tahun 2013*. Hasil penelitian ini adalah kekalahan PDI-P pada pemilukada tahun 2013 menunjukkan adanya perubahan makna simbol politik yang ada dan selama ini berjalan. Perubahan makna simbol politik dalam kekalahan PDI-P tahun 2013 itu dipengaruhi oleh: Pertama, adanya masalah internal yang kuat dalam tubuh partai PDI-P. Penentuan calon yang terlambat oleh DPD PDI-P saat itu menjadi penyebab utama kekalahan partai yang berlambang benteng ini. Kedua, munculnya isu politik dalam pemilukada Kabupaten Klungkung tahun 2013, isu politik ini mengenai diskriminasi terhadap pasangan calon nomor urut 4 I Nyoman Suwirta-I Made Kasta yang disebut sebagai bekas panjak (pelayan atau buruh) yang tidak layak memangku jabatan sebagai Bupati Klungkung saat itu. Ketiga, adanya pragmatism masyarakat

Kabupaten Klungkung yang mengalami kejenuhan dalam memilih calon dari partai yang sama. Pragmatisme ini juga dipengaruhi oleh kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan PDI-P sebelumnya yang dirasa tidak berjalan efektif.³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asdar Abidin dan Muh Iqbal Sultan dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Kekalahan Calon PDI-P Dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013 :Studi Strategi Kampanye Politik*. Hasil penelitian ini adalah Strategi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati yang diusung oleh PDI-P dalam Pilkada Kabupaten Polman periode 2008-2013 adalah dengan memasang jutu kampanye yang kredibel, menetapkan pesan politik yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, melakukan pemilihan media selektif, serta menetapkan potensi khalayak pemilih. Namun pada hasil penelitian ini, menunjukkan adanya faktor lain yang diusung oleh PDI-P antara lain, faktor incumbent, tidak ada koalisi partai, kuatnya politik aliran, serta adanya sistem pilkada yang semakin terbuka. Selain itu adanya faktor-faktor lain tersebut yang mengakibatkan kekalahan PDI-P menurut informan sebagai berikut, pertama, masalah incumbent. Kedudukan incumbent dianggap masih kuat dan matang dalam

³ Raenaldy Yoga Pratama, "*Kekalahan PDI-P Dalam Pemilihan Pilkada Kabupaten Klungkung Tahun 2013*", Volume 3 No.5 Tahun 2013, hlm. 5

merencanakan komunikasi politik, termasuk mempengaruhi PNS sebagai salah satu mesin politiknya. Kedua, faktor politik aliran. Masyarakat masih mampu dipengaruhi keterikatan kekerabatan dengan pesan-pesan politik yang dilakukan oleh juru kampanye, sehingga muncul banyak pendapat bahwa pasangan incumbent mendapat restu dari orang tua. Ketiga, tidak adanya koalisi yang dibangun oleh PDI-P serta diberlakukannya UUD Pilkada Langsung. Ketiga faktor tersebut menjadi kelemahan di tingkat PDI-P, sehingga media cetak menayangkan ke masyarakat baik melalui polling dan lembaga informasi lainnya masyarakat cenderung menerima dan mempercayai informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori lingkaran bahwa khalayak tidak mampu menolak informasi setelah ditembakkan oleh media komunikasi.⁴

Dari kedua penelitian tersebut fokusnya sama dengan yang akan peneliti lakukan. Penelitian disini mengenai kekalahan Seno Samodro dalam pilkada yang terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya dalam periode sebelumnya sehingga masyarakat mengalihkan suaranya untuk Agus Purmanto dan terkait dengan perolehan suara yang hasilnya relatif rendah dari daerah pilihan yang lain dalam satu kabupaten. Peneliti akan menggunakan metode penelitian

⁴ Asdar Abidin dan Muh. Iqbal Sultan, “*Analisis Kekalahan Calon PDI-P Dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013 : Studi Strategi Kampanye Politik*”, Volume 1 No. 1 Tahun 2011, hlm. 40-41

kualitatif dalam mengetahui kekalahan perolehan suara untuk Seno Samodro yang terjadi di Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali .

1.5.2 Pilkada

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen yang penting untuk memenuhi desentralisasi politik.⁵ Pemilihan kepala daerah secara langsung terkait dengan peran masyarakatnya dalam memberikan dukungan suara kepada partai politik atau pasangan calon yang ada. Pemilihan kepala daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala daerah. Selain itu pemilihan kepala daerah akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena semakin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/ atau daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat yang memenuhi syarat. Pilkada dilakukan satu paket dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud yaitu bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.

⁵ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*,(Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010) hlm. 130

Pemilihan kepala daerah langsung yang selanjutnya disebut Pilkada menempatkan rakyat sebagai subjek dalam proses pemilihan kepala daerah saat ini telah dipilih sebagai mekanisme yang menggantikan demokrasi pemilihan via elit. Oleh banyak kalangan, sistem Pilkada itu dianggap lebih baik dari sistem sebelumnya karena ruang keterlibatan rakyat lebih terbuka.⁶ Dengan adanya pilkada, masyarakat tidak lagi menjadi penonton proses politik yang akan menentukan kehidupan mereka, tetapi pilkada telah menempatkan rakyat menjadi pemutus akhir siapa yang layak akan menjadi seorang pemimpin. Selain itu pilkada akan menjadikan tata kehidupan demokrasi yang lebih luas dan lebih baik.

Di dalam pilkada terdapat dua aktor penting terhadap pilkada. Kedua aktor tersebut adalah partai politik dan kandidat yang akan bersaing. Kedua aktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari perannya karena sama-sama saling membutuhkan. Pertama, partai politik sangat penting di dalam pilkada karena partai politik mempunyai kepentingan tersendiri. Kepentingan partai politik tersebut yaitu berkaitan dengan keharusan partai politik untuk memunculkan kandidat yang diharapkan mampu bersaing dalam pilkada. Kepentingan ini yang kemudian menjadikan partai politik melirik calon pemimpin yang telah dapat menjadi sesosok figur dalam masyarakat dan mengayomi masyarakat.

⁶ Sigit Pamungkas, *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*, (Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism, 2010) hlm. 47

Kedua, kandidat yang bersaing mempunyai kepentingan yaitu kepentingan untuk mendapatkan dukungan yang pasti pada saat pemilihan. Dukungan yang pasti tersebut berasal dari masyarakat yang akan melakukan pilkada, karena masyarakat yang akan memberikan suara bagi kandidat yang bersaing dan masyarakat yang akan menentukan hasil perolehan suara yang terbanyak diantara kandidat-kandidat yang bersaing.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Berdasarkan pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tahapan-tahapan pilkada ada dua yaitu tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan. Tahap persiapan dalam pilkada meliputi tahapan pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan pilkada, pembentukan panitia (pengawas, PPK,

dan KPPS), serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Setelah itu baru dilakukan tahap pelaksanaan pilkada yang meliputi penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, serta penghitungan suara, penetapan calon kepala/ wakil kepala daerah yang terpilih termasuk pengesahan dan pelantikan. Calon kepala daerah yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan kepala daerah.

Proses pemilihan kepala daerah berujung pada terpilihnya kepala daerah yang akan memimpin daerah selama 5 tahun. Dalam Pilkada tidak lepas dari politik uang yang digunakan sebagai salah satu strategi pemenangan calon kepala daerah. Yang dimaksud dengan politik uang adalah uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta pilkada. Munculnya fenomena politik uang tidak hanya terjadi ditingkat pusat tetapi ditingkat daerah politik uang masih sangat kuat untuk memenangkan pilkada.

Politik uang terjadi ketika pihak penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya dapat berupa uang tetapi juga dapat berupa bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu. Masyarakat kalangan kelas bawah mayoritas mudah menjadi sasaran para calon Kepala Daerah yang menjaankan praktik

money politic.⁷ Dalam kenyataannya masyarakat kalangan menengah ke bawah lebih mudah untuk menjadi sasaran politik uang demi mendapatkan imbalan yang berupa uang untuk menjual hak suara mereka. Masyarakat ini mempunyai tingkat kesadaran politik yang rendah. Menjelang pilkada, isu politik uang sudah mulai berhembus kencang. Praktek politik uang ini dilakukan dengan cara yang tertutup. Besarnya uang untuk membeli suara masyarakat berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Dalam konteks politik uang, calon kepala daerah beserta tim suksesnya harus dapat menguasai situasi yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan agar politik uang yang tersedia tepat pada sasaran. Dalam praktek politik uang dalam pilkada dikenal beberapa tahapan dana yang dibutuhkan, dimulai dari uang perkenalan, uang pangkal, uang fraksi hingga uang yang ditujukan untuk membeli suara masyarakat.⁸ Pemberian uang dalam politik uang tidak selalu dilakukan secara langsung oleh kandidat, tetapi pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain. Strategi pemberian uang dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:⁹

1. Sistem Ijon

Sistem ijon yaitu sebagai suatu sistem bayar dimukayang bersifat mengikat.

⁷ Eka Setia Rini dan Rr. Nanik Setyowati, "Makna Money Politic s pada Masyarakat Kelas Menengah Bawah" Volume 1 No.2 Tahun 2014, hlm.109-126.

⁸. Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 62

⁹ Ibid, hlm.75-80

2. Melalui tim sukses calon

Dalam praktek politik uang, melalui tangan-tangan inilah uang disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Terdapat tim dengan spesialisasi masing-masing yang mengurus tentang pemberian uang kepada masyarakat, karena persoalan dana disini bersifat sensitif dan rahasia.

3. Melalui orang terdekat

Tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling calon kepala daerah mampu menembus sasaran yang akan diberikan dana. Dalam praktek politik uang berbagai cara dilakukan, termasuk latar belakang kandidat kemudian dipelajari secara seksama.

4. Pemberian Langsung Oleh Kandidat

Tidak menutup kemungkinan calon kepala daerah mengadakan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Sangat mungkin calon kepala daerah terlibat langsung dalam penyampaian sejumlah dana untuk kepentingan pemilihan.

5. Dalam Bentuk Cheque

Cara ini digunakan sebagai antisipasi apabila kelak ternyata calon Kepala Daerah yang mengeluarkan cheque tersebut tidak terpilih, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu,

biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara. Setelah melihat beberapa jenis pemilih, para kontestan pemilu nanti harus bisa memahami segala jenis pemilih dan berusaha merebut suara pemilih tersebut, yaitu tentunya melalui kampanye. Karena dengan memahami jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk memenangkan pemilu menjadi semakin kuat. Mereka harus mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih yang ada. Untuk itu mereka pada umumnya membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh ataupun hal-hal yang membuat setiap jenis pemilih di atas mau mendukung mereka dalam pemilu (Pilkada) nanti.¹⁰

1.5.3 Strategi Pemenangan Calon Kepala Daerah Terhadap Voting

Strategi yang digunakan oleh calon Kepala Daerah dalam memenangkan suatu kompetisi dalam Pilkada langsung ini terdiri dari beberapa bentuk strategi, diantaranya yaitu:¹¹

1. Strategi Komunikasi Politik

Langkah pertama dalam strategi komunikasi politik, ialah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya,

¹⁰ Agung Wibawanto, *Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat*, (Yogyakarta : Pembaruan. 2005), hlm. 22

¹¹ Lionel Zetter, *Strategi Memenangkan Pilkada Pemilu & Pilpres*, (Jakarta : PT. Ina Publikitama, 2008), hlm. 16-20

ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik.¹² Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat. Strategi merupakan hal yang penting dalam upaya memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum dan dalam pengambilan keputusan politik lainnya.

Pada hakikatnya, suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya akan merupakan keputusan strategis yang paling tepat bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan, terutama memenangkan pemilihan umum.

a. Merawat Ketokohan

Pemberi suara dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya. Citra jabatan ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, keberanian, dan sebagainya, serta memiliki rekam

¹² Anwar Arifin, *Komunikasi Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 236

jejak yang baik dalam perjuangan politik terutama perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Karakteristik kepahlawanan seperti itu juga dipublikasikan oleh media massa atau media sosial, sehingga tercipta citra dan opini publik yang positif baginya dikalangan publik.

b. Memantapkan Kelembagaan

Selain memelihara ketokohan, langkah strategis utama yang harus dilakukan adalah memantapkan kelembagaan atau membesarkan lembaga. Hal itu sangat penting sebagai faktor yang mendasar dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum. Lembaga yang dimaksud adalah wadah kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam dunia politik, lembaga itu pasti berupa partai politik, parlemen, dan pemerintahan atau birokrasi. Lembaga juga memiliki karakteristik seperti manusia yang meliputi eksistensi, kepribadian, dan aktivitas. Lembaga juga dipersepsikan oleh khalayak dan berdasarkan persepsi itu akan terbangun citra dari lembaga, misalnya citra partai politik, citra diri parlemen, dan citra diri birokrasi. Citra dari partai politik adalah sesuatu yang dipercaya dan diharapkan oleh rakyat tentang apa yang dilakukan

oleh partai politik tersebut. Jadi, khalayak dapat mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu, meskipun ia tidak menyukai aktivitas partai politik tersebut. Dengan kata lain, citra partai politik akan memainkan peran-peran penengah dan menerjemahkan aktifitas yang berlangsung dalam lingkungan politik ke dalam makna bagi khalayak politik, terutama pemberi suara dalam pemilihan umum.

c. Menciptakan Kebersamaan

Langkah strategis ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dan rakyat dengan cara mengenal rakyat dan menyusun pesan yang homofili. Hal itu diperlukan agar komunikator politik dapat melakukan empati. Komunikasi politik yang ditujukan kepada rakyat atau individu yang selalu berinteraksi dengan individu-individu lainnya dalam suatu wadah yang disebut masyarakat.

Rakyat dalam strategi ini sama sekali tidak pasif melainkan sangat aktif. Bahkan, khalayaklah yang sesungguhnya menentukan bentuk dan isi pesan yang harus disusun oleh komunikator politik, jika ingin diterima oleh rakyat. Pemilih memberikan suaranya kepada partai atau kandidat yang sesuai

dengan ideologi politiknya, karena hal ini merupakan komponen psikologi yang harus dikenal oleh rakyat yang ternyata memiliki pengaruh yang kuat pada diri rakyat yaitu keyakinan atau ideologi, termasuk agama dan tradisi. Partai atau kandidat yang tidak sesuai dengan ideologi politiknya akan ditinggalkan. Faktor lain yang harus dipahami yaitu pengaruh kelompok dan masyarakat yang ada, serta situasi dimana kelompok itu berada.

d. Menetapkan metode

Langkah strategis berikutnya dalam upaya mencapai tujuan komunikasi politik adalah memilih metode penyampaian dan metode menyusun isi pesan politik yang sesuai. Pemilihan metode dan media ini harus disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas, dan biaya. Suara yang diraih dalam pemilihan umum merupakan hasil konkrit dari keseluruhan kerja politik termasuk komunikasi politik, khususnya yang berkaitan dengan metode yang digunakan.

Penerapan metode tersebut dalam komunikasi politik dapat berupa metode *redundancy*, yang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi dengan jalan mengulang-ulang pesan politik kepada khalayak seperti yang dilakukan dalam iklan perusahaan yang menawarkan barang dan jasa di dalam siaran radio dan

televise. Dengan metode ini banyak manfaat yang dapat ditarik, manfaatnya antara lain adalah rakyat akan lebih memperhatikan pesan tersebut, karena pesan dilakukan berulang-ulang dan kontras dengan pesan yang lain yang tidak diulang-ulang sehingga akan lebih menarik perhatian. Manfaat lainnya adalah rakyat tidak akan mudah melupakan pesan tersebut.

Metode lain yang sangat penting dalam komunikasi politik adalah metode *persuasive* yaitu mempengaruhi masyarakat dengan cara membujuk. Dalam hal ini, masyarakat akan diduga jalan pikiran dan perasaannya. Metode *persuasive* ini merupakan satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan jalan pikiran tidak member kesempatan untuk berfikir kritis, bahkan masyarakat dapat terpengaruh secara tidak sadar.

Selain itu menggunakan metode edukatif, sebagai salah satu usaha untuk mempengaruhi masyarakat dari suatu pernyataan politik yang dilontarkan, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang berisi pendapat, fakta, dan pengalaman. Metode ini juga disebut metode mendidik, yang memberikan suatu gagasan kepada masyarakat berdasarkan fakta, pendapat, dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini dilakukan secara teratur dan berencana dengan tujuan mengubah

tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Metode edukatif diharapkan akan memberikan pengaruh yang mendalam kepada masyarakat, meskipun hal ini akan memakan waktu yang lebih lama disbanding dengan metode persuasif.

Metode berikutnya adalah koersif, yang berate mempengaruhi masyarakat dengan cara memaksa. Dalam hal ini, masyarakat dipaksa tanpa perlu berfikir panjang untuk menerima gagasan yang dilontarkan. Pesan dari komunikator politik memuat selain pendapat dan pengalaman, juga berisi ancaman-ancaman. Metode koersif ini biasanya dalam bentuk peraturan, perintah, dan intimidasi yang untuk pelaksanaannya didukung oleh suatu kekuatan yang cukup tangguh.

2. Strategi *Political Winning*

Political Winning adalah divisi dari *proximity* yang khusus dalam menangani pemenangan calon Kepala Daerah. Dalam hal ini pemenangan Pilkada merupakan layanan konsultasi terintegrasi bagi calon Kepala Daerah untuk dapat memenangkan kursi Kepala Daerah. Strategi-strategi yang ada dalam *Political Winning* yaitu:

1. Strategi Pendampingan Pemenangan Pilkada

a. Pemetaan Perilaku Pemilih

Pemetaan perilaku pemilih dilakukan dengan cara memetakan pemilih berdasarkan demografi dan preferensi politik, memetakan isu-isu strategis lokal, memetakan nama-nama yang berpotensi menjadi kawan dan lawan, serta memetakan media komunikasi yang efektif digunakan oleh pemilih.

b. Pemetaan Jaringan

Pemetaan jaringan dilakukan dengan cara inventarisir jaringan yang potensial menjadi mesin politik, memetakan wilayah dari masing-masing jaringan, dan inventarisir nama-nama yang memiliki potensi menjadi tim sukses.

c. Pemetaan Media Massa

Pemetaan media massa dilakukan dengan cara menginventarisir semua media massa lokal, menganalisis kecenderungan isi dari media, menjajaki kemungkinan kerja sama, dan analisis media paling efektif.

2. Strategi Memengaruhi Perilaku Pemilih

a. Melakukan Riset

Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemetaan perilaku pemilih berdasarkan demografi dan preferensi politik, pengukuran popularitas atau akseptabilitas terhadap calon

Kepala Daerah, tingkat kesukaan atau akseptabilitas terhadap calon Kepala Daerah, dan menjangkau aspirasi pemilih.

b. Kegiatan Door to Door Campaign

Dilakukan dengan cara persiapan relawan, pendidikan pelatihan relawan door to door campaign, serta perencanaan dan eksekusi strategi door to door campaign.

c. In Depth Interview Tokoh Masyarakat

Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi reference group, kontrak politik dengan tokoh reference group untuk kemenangan kandidat.

d. Focus Group Discussion (FGD)

Melalui identifikasi isu-isu dalam masyarakat, identifikasi media komunikasi paling efektif dalam mempengaruhi pemilih, pemetaan nama-nama yang berpotensi menjadi lawan dan kawan.

3. Strategi Mobilisasi Massa

a. Pembangunan Jaringan dan Organ Politik

Strategi ini melalui beberapa cara yaitu design tim sukses, pembentukan tim sukses tingkat provinsi, kabupaten,

kota, kecamatan, dan desa. Selain itu juga dilakukan perluasan jaringan sosial.

b. Pelatihan Manajemen Tim Sukses

Pelatihan ini berkaitan dengan pemahaman perilaku pemilih, organisasi tim sukses, media kampanye, targeting, penyusunan dan evaluasi program.

c. Penyusunan Program Pemenangan

Strategi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu design program kunjungan, ceramah, aksi sosial, kontrak politik, peresmian, komunikasi tradisional, hiburan, komunikasi multimedia dan alternatif.

d. Pembentukan Tim Kampanye

e. Pembentukan Tim Aksi

f. Pembentukan Tim Mobilisator

4. Strategi Pencitraan

Strategi pencitraan untuk memenangkan pilkada bagi calon Kepala Daerah dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu:

a. Pembentukan media center mengorganisasi program, target, evaluasi program dan pencitraan kandidat.

b. Strategi komunikasi media cetak, radio, dan televise (*design, contain, timing, media placement, volume dan budgeting*)

- c. Strategi komunikasi media *out door design*, isi, *timing*, *volume*, *budgeting*.
- d. Strategi komunikasi tatap muka.
- e. Strategi Komunikasi alternatif.

1.5.4 Ketidakpuasan Masyarakat

Dalam hubungan relasional antara calon Kepala Daerah dan masyarakat secara luas, hal penting yang harus dipertimbangkan oleh Kepala Daerah adalah kepuasan masyarakat. Ketika masyarakat menilai bahwa secara keseluruhan terdapat perbaikan kualitas hidup, kepuasan terhadap Kepala Daerah yang berkuasapun meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka melihat menurunnya kualitas hidup seperti tingginya angka inflasi, pengangguran, dan rendahnya kualitas penerapan hak asasi manusia, tingkat kepuasan terhadap Kepala Daerah yang berkuasa juga akan menurun. Biasanya kepuasan hidup dikaitkan dengan prestasi perbaikan ekonomi oleh Kepala Daerah yang berkuasa, akan tetapi hal ini tidak bersifat absolut.

Terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dengan kepuasan masyarakat yang menunjukkan bahwa suatu daerah yang maju (kaya) tidak berarti masyarakatnya memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Hal ini dikarenakan penilaian akan kepuasannya tidak absolute, melainkan relatif dengan beban hidup masyarakat, karena itu konsep kepuasan harus dilihat

dan diartikan secara proporsional.¹³ Namun, bukan berarti tidak dapat menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Media jajak pendapat dan *polling* seringkali menggambarkan derajat kepuasan masyarakat. Dengan puasnya masyarakat terhadap kinerja Kepala Daerah, semakin besar keinginan masyarakat untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja Kepala Daerah, akan berkurang tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan Kepala Daerah tersebut dalam menyelesaikan masalah di suatu daerah tertentu. Hal ini membuat Pemimpin mengalami kesulitan dalam meyakinkan kembali pemilih. Masyarakat akan mulai melihat pemimpin lain yang dianggap mampu secara konsisten memecahkan permasalahan yang ada.

Dimensi kepuasan masyarakat bukanlah dimensi yang objektif, melainkan subjektif. Masyarakat puas atau tidak puas sangat tergantung pada harapan awal yang muncul karena janji-janji yang diberikan oleh Kepala Daerah. Janji dan harapan yang diberikan kepada masyarakat hanya sebagai langkah awal dalam membina hubungan jangka panjang. Bukan janji dan harapan itu yang penting, melainkan realisasi janji dan harapan tersebutlah yang menentukan puas atau tidaknya masyarakat. Ketika masyarakat menilai bahwa janji dan harapan yang diberikan terlalu muluk dan tidak sesuai harapan dengan realisasinya, maka yang akan muncul

¹³Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hlm. 55-56

adalah kekecewaan. Ketika hal-hal yang dilakukan ternyata lebih dari segala yang dijanjikan, maka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemimpin akan semakin tinggi. Sesuai dengan janji awal sudah cukup untuk menciptakan kepuasan masyarakat, apalagi jika dapat memberikan lebih dari janji-janji tersebut. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat sangat membantu untuk meningkatkan reputasi citra dari pemimpin dalam jangka panjang.

1.5.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih yaitu faktor-faktor psikologis (internal), sosiologis (eksternal), faktor-faktor sosiokultural dan faktor-faktor ekonomi.¹⁴

a. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal atau sosiologis berasumsi bahwa kepertaian dan pengelompokkan pemilih pada umumnya didasarkan pada kelas sosial. Kelas sosial sangat mempengaruhi pilihan pemilih. Mayoritas pemilih yang berasal dari kelas menengah cenderung memilih partai konservatif, sedangkan mayoritas kelas pekerja lebih memilih partai buruh.

¹⁴ Arif Sugiono, *Strategi Political Marketing*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hlm. 118-122

b.Faktor Internal

Faktor internal atau psikologis berasumsi bahwa pada dasarnya teori perilaku pemilih dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap tersebut dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang berjalan cukup lama.

Selain itu terdapat tiga faktor bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan pemilih, yaitu:

1. Kondisi awal pemilih

Hal ini dimaksudkan bahwa kondisi awal pemilih merupakan karakteristik yang melekat dalam diri pemilih. Setiap individu mempunyai sistem nilai, keyakinan, dan kepercayaan yang berbeda-beda pula. Kondisi ini sangat mempengaruhi individu ketika mengambil keputusan politik.

2. Faktor media massa

Faktor media massa ini yang mempengaruhi opini publik. Media massa yang memuat data, informasi, dan berita berperan sangat penting dalam mempengaruhi opini di masyarakat. Demikian pula dengan pemaparan para ahli, iklan politik, hasil seminar, survey, dan berbagai hal yang diulas dalam media massa akan menjadi pertimbangan pemilih.

3. Faktor Partai politik atau kontestan

Faktor ini berasumsi bahwa pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi dan kualitas para tokoh-tokoh partai politik dengan pandangan mereka masing-masing. Dalam hal ini masyarakat lebih sering melakukan penilaian terhadap figure tokoh partai politik, sekaligus menjadi barometer mereka dalam menilai partai politik yang bersangkutan.

1.5.6 Proses Pengambilan Keputusan

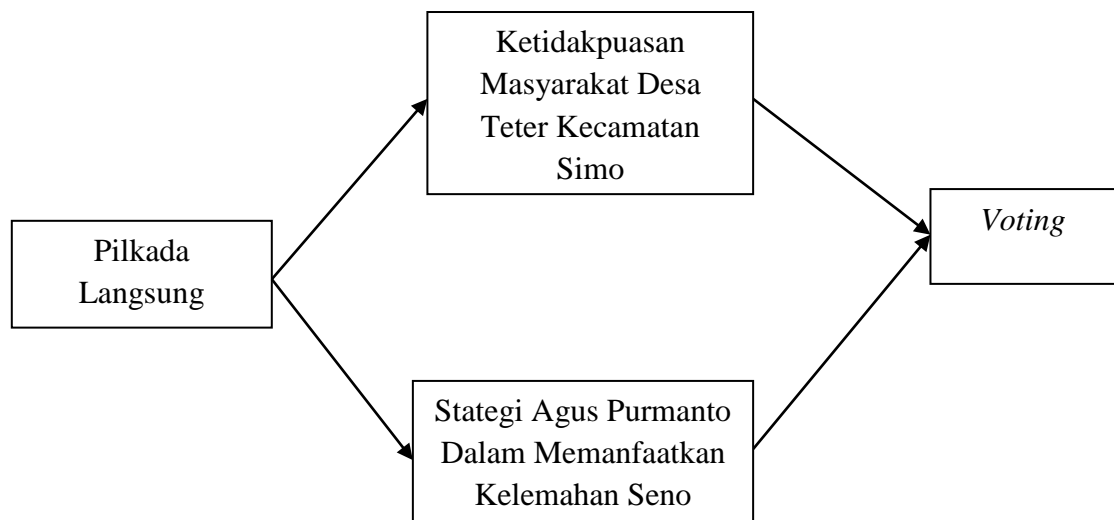
Berkaitan dengan keputusan memilih,, antropolog James Spradley menjelaskan bahwa setiap individu dalam memustikan sesuatu, pada umumnya dimulai dari kognitif seseorang. Kognitif menurut Spradley adalah apa yang tertanam dalam benak seseorang, yaitu sesuatu yang dipercayai dan diterima sebagai sesuatu yang benar oleh seseorang atau komunitas tertentu atau masyarakat dalam budaya tertentu.¹⁵ Menurut George R. Terry bahwa definisi dari pengambilan keputusan adalah pemilihan alternative perilaku dari dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan merupakan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selain mengumpulkan fakta-fakta dan data, peranan persepsi akan mengambil alih ketika seseorang akan menerima semua fakta dan data itu kemudian memberikan penilaiannya. Persepsi pemilih mempengaruhi pengambilan

¹⁵ Sugiono, *Op.Cit.*, hlm. 138

keputusan karena aspek yang terdapat dalam proses pengambilan keputusan yaitu proses identifikasi alternative memiliki proses yang sama dengan proses persepsi. Persepsi seorang pemilih akan mempengaruhi pemilih ketika akan mengambil keputusan.¹⁶

1.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1



Pilkada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala daerah. Pilkada dilakukan dalam rangka untuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Boyolali terutama di Desa_Teter dan Desa Wates. Pilkada di Desa Teter dan Desa Wates merupakan suatu fenomena yang menarik karena persaingan tersebut di ikuti oleh

¹⁶ Achmad Syarief Addasuqi, “ Pengaruh Iklan Politik Peserta Pemilu Dan Persepsi Pemilih Terhadap Pengambilan Keputusan Ditinjau Dari Tempat Tinggal Dan Jenis Kelamin Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Desa Tapis Kecamatan Tana Paser”, Volume 4 No. 1 Tahun 2015. hlm. 72

kedua calon yang salah satu calon kepala daerah tersebut telah menjabat pada periode sebelumnya. Selain itu terdapat fenomena lain yang menarik yaitu terdapat ketidakpuasan masyarakat Desa Teter dan Desa Wates terhadap salah satu calon kepala daerah yaitu Seno Samodro yang pada periode sebelumnya memenangkan Pilkada tersebut. Ketidakpuasan masyarakat tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Agus Purmanto melalui strategi-strategi yang di realisasikan pada Desa Teter dan Desa Wates. Strategi yang digunakan antara lain yaitu membenahi infrastruktur yang rusak dan memberikan dana untuk Desa Teter selain itu strategi yang dilakukan di Desa Wates yaitu dengan cara akan mengembalikan keadaan mobilisasi PNS di Kecamatan Simo seperti situasi awal.

Dalam Pilkada langsung ini dilakukan beberapa pendekatan perilaku pemilih yang diantara ketiga pendekatan tersebut masih ada pendekatan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Desa Teter dan Desa Wates. Sehingga *voting* dari Pilkada langsung ini menyebabkan pemilih Desa Teter dan Desa Wates yang setiap periodenya selalu berpihak kepada calon Kepala Daerah yang diusung oleh PDIP beralih kepada calon Kepala Daerah yang ke-2 yaitu Agus Purmanto. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang kekalahan Seno Samodro yang dianalisis melalui ketidakpuasan masyarakat Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo terhadap calon Kepala Daerah yang pertama yaitu Seno Samodro dan pengaruh perolehan suara di lihat dari pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dimaksudkan sebagai pembatasan pengertian terhadap suatu konsep dengan menggunakan konsep lain yang sudah dipahami. Melalui konsep-konsep ini diharapkan mampu untuk membahas persoalan-persoalan yang ada. Menurut Nazir konsep dipakai peneliti untuk mendeskripsikan dunia empiris yang diamatinya, dapat berupa benda atau gejala sosial tertentu yang bersifat abstrak.¹⁷ Operasionalisasi konsep yang dipakai dalam penelitian ini yaitu alasan-alasan yang mempengaruhi perolehan suara bagi calon Kepala Daerah yang bersaing, yaitu:

1. Faktor-faktor psikologis (internal).
2. Faktor-faktor sosiologis (eksternal).
3. Faktor-faktor sosiokultural.
4. Faktor-faktor ekonomi.

Selain itu perilaku pemilih dapat dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakatnya terhadap salah satu calon Kepala Daerah. Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap salah satu calon Kepala Daerah (Seno Samodro) yang kemudian dimanfaatkan kelemahannya oleh calon Kepala Daerah kedua (Agus Purmanto) di daerah tertentu melalui strategi-strategi yang dimiliki, yaitu:

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 17

1. Strategi komunikasi politik.
2. Strategi *political winning*.

Adanya karakteristik pemilih maka peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait dengan kekalahan Seno Samodro dalam Pilkada Kabupaten Boyolali dilihat dari ketidakpuasan masyarakat Desa Teter dan Desa Wates terhadap kepemimpinan Seno Samodro periode sebelumnya yang kemudian mencalonkan kembali dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2015.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Menurut Singarimbun membagi perspektif penelitian dengan istilah “tipe penelitian” menjadi tiga tipe , yaitu:¹⁸

a. Penelitian Deskriptif

Merupakan suatu penelitian yang bermaksud memperoleh atau mendapatkan gambaran tentang sifat dari suatu gejala masyarakat. Penelitian deskriptif ini umumnya untuk mengetahui perkembangan dan frekuensi sarana fisik tertentu.

b. Penelitian Eksploratif

Merupakan suatu penelitian yang bertujuan memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu dengan maksud untuk

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1998), hlm.15

merumuskan masalah secara terperinci. Penelitian eksploratif bersifat terbuka, masih mencari-cari belum memiliki hipotesis.

c. Penelitian Eksplanatori

Penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesa tentang hubungan kausalitas variabel yang diteliti dari hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian penjelasan berkaitan dengan hubungan-hubungan variabel-variabel penelitian-penelitian serta hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang dalam obyek penelitian (lembaga, masyarakat, daerah) pada saat sekarang, yang mendasarkan faktor-faktor yang nampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu, misalnya interaksi sosial, sistem kekerabatan, dan lain-lain.

Sementara itu Lexy J. Moloeng mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁹ Selanjutnya Nasution mengatakan bahwa penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, karena dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam setting latar yang natural.²⁰

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dengan memfokuskan untuk mengetahui faktor-faktor kekalahan Seno Samodra di Desa Teter dan Desa Wates yang mayoritas tidak memberikan suaranya pada kandidat Kepala Daerah yang pertama yaitu Seno Samodra yang diusung oleh PDIP.

1.8.3 Informan Penelitian

Informan dapat diartikan sebagai orang yang akan memberikan informasi terkait masalah yang diteliti. Di dalam pemilihan informan digunakan teknik *purposive sampling*, artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh orang-orang yang mengetahui dengan benar tentang masalah yang terkait dengan penelitian. Informan yang dijadikan sumber penelitian ini adalah:

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 6

²⁰ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara bekerjasama dengan PT.Ikrar Mandiriabadi, 2003), hlm.18

- a. Bapak Andy Yoeniawan, SE salah seorang masyarakat Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- b. Bapak Bahtiar Joko Saputro, S.Pd salah seorang masyarakat Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- c. Bapak Joko salah seorang masyarakat Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- d. Bapak Indrayanto merupakan Kepala Desa di Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- e. Bapak Marsono merupakan Kepala Desa di Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- f. Bapak Santoso merupakan ketua tim sukses dari Gerindra yang mengusung Agus Purmanto.
- g. Bapak Khayat merupakan tokoh agama di Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- h. Ibu Sulaikhah merupakan Ketua PKK di Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- i. Sdri. Indri merupakan masyarakat Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- j. Ibu Noni merupakan PNS di Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

- k. Ibu Desi merupakan tim sukses dari Gerindra yang mengusung Agus Purmanto.
- l. Bapak Danil merupakan tim sukses dari Gerindra yang mengusung Agus Purmanto.
- m. Ibu Santi merupakan masyarakat Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- n. Sdr. Andi merupakan tim sukses dari Gerindra yang mengusung Agus Purmanto.
- o. Bapak Budi merupakan masyarakat Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- p. Bapak Ahmad merupakan masyarakat Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- q. Ibu Fitri merupakan masyarakat Desa Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- r. Bapak Widhi merupakan masyarakat Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- s. Sdr. Ardi merupakan masyarakat Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- t. Ibu Rita merupakan masyarakat Desa Teter Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

Terpilihnya 20 narasumber atau informan tersebut dapat dinilai masih mengandung sisi kelemahan, yaitu belum terakomodasinya kebijakan yang dibuat oleh Seno Samodro yang dijanjikan kepada masyarakat Kecamatan Simo terutama Desa Teter dan Desa Wates. Masyarakat merasa kecewa atas kebijakan yang belum diimplementasikan oleh Seno Samodro dan adanya mobilisasi PNS pada periode 5 tahun yang lalu yang berakibat perolehan suara untuk Seno Samodro pada Pilkada 2015 relatif rendah dari periode sebelumnya.

1.8.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian ini karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses peneliti ini. Dalam hal pengumpulan data, digunakan *interview guide* untuk memandu pada saat wawancara berlangsung.

1.8.5 Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer diperoleh dari personil yang mempunyai posisi kunci terhadap suatu peristiwa, fenomena yang diteliti, informan kunci

tersebut adalah masyarakat Desa Teter, Tim Sukses, tokoh partai politik, dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau tidak langsung, yang diperoleh dari dokumen seperti perundang-undangan, data dari Komisi Pemilihan Umum, referensi maupun catatan-catatan di Kantor Pemerintahan Desa maupun Kantor Pemerintahan Kecamatan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Wawancara mendalam

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari narasumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²¹ Wawancara dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi secara *holistic*.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam. Wawancara sebagai penuntun peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan. Selanjutnya informan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk

²¹ Djaman Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.103

menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala, fenomena, dan situasi.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²² Dalam hal ini untuk mendapatkan info dari masyarakat Desa Teter yang tidak memberikan suaranya kepada calon Kepala Daerah yang pertama yaitu Seno Samodro dilakukan dengan pengamatan menggunakan alat bantu atau media visual atau audiovisual.

c. Metode Dokumentasi

Metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, majalah, majalah agenda, dan sebagainya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai metode pelengkap yang paling penting dalam penelitian ini terutama untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan administrasi.

d. Studi Literatur

Selain teknik wawancara sebagai usaha untuk mendapatkan data primer, maka peneliti juga mencari bahan-bahan kepustakaan atau studi literature atau studi terhadap buku-buku lainnya sepanjang ada

²² Djaman Satori, *Op.cit.*, hlm.105

hubungan dengan objek penelitian sehingga dapat menambah kevalidan data.

1.8.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu metode deskriptif analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka atau hanya sedikit bersifat menganalisis sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi. Analisis dilakukan dengan menguraikan informasi-informasi secara logis.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola tertentu. Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif ini, meliputi:

a. Pengumpulan seluruh data

Dalam tahapan pengumpulan data, peneliti dituntut untuk mampu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

b. Reduksi data

Langkah reduksi data dilakukan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang

inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

c. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan sekumpulan informasi atau data dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan dengan melakukan koding. Sehingga peneliti dapat menguasai data.

d. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.8.8 Kualitatif Data

Uji keabsahan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan triangulasi dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan. Pendekatan triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang

diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Triangulasi ini dapat dilakukan dengan cara:²³

1. Membandingkan data hasil penelitian dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatankannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi, setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

²³ Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif ; Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 87